

Tanggal :03-05-2016 Waktu : 08:05:57, Url: <http://ppsstainmetro.ac.id/>

Siti Nurjanah, Dosen STAIN Jurai Siwo Metro Kandidat doktor Hukum Keluarga IAIN Raden Intan Lampung

KOTA Malang mendeklarasikan sebagai kota ramah anak (Republika, 7/3/2016). Upaya ditempuh oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, salah satunya dengan mewujudkan sekolah ramah anak.

Beberapa indikator sekolah ramah anak adalah tanpa kekerasan dan diskriminasi, baik fisik maupun nonfisik, terpenuhinya hak anak, adanya peran serta aktif masyarakat, ketersediaan UKS dan guru konseling BP, serta area permainan dan ruang baca. Ikhtiar Pemkot Malang ini perlu diapresiasi mengingat kekerasan pada anak terus terjadi dan dan meningkat.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan di 2005 mengeluarkan kebijakan tentang kota layak anak. Dalam kebijakan tersebut, kota layak anak adalah upaya pemerintah kabupaten atau kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, institusi, serta program kota layak anak.

Kota layak anak kemudian juga sering disebut para ahli kota ramah anak, adalah upaya menghadirkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Pertanyaan yang muncul, sejauh mana pemerintah kabupaten/kota dalam memusatkan perhatian pada anak jika data kekerasan anak meningkat?

Dalam kepentingan politik di level daerah, fakta yang muncul pembangunan lebih diutamakan, yaitu pada wilayah peningkatan ekonomi dan infrastuktur. Oleh karena itu, menjadi menarik, ikhtiar Pemkot Malang menggagas kota ramah anak melalui inisiatif program pendidikan.

Bentuk Kekerasan Anak

Kekerasan pada anak terus terjadi dan tiada henti. Hal ini mengakibatkan traumatis berkepanjangan bagi pertumbuhan mental generasi. Kita menyaksikan di televisi, kekerasan anak dapat terjadi di lembaga pendidikan, tempat penitipan anak, di lingkungan masyarakat, bahkan kekerasan terjadi di internal keluarga.

Kekerasan pada anak dilakukan dengan berbagai modus. Pertama, yang paling tragis adalah kekerasan dalam level kekerasan seksual. Bahkan ini dilakukan oleh beberapa oknum guru yang ada di lembaga pendidikan tersebut.

Kita semua masih ingat kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta Internasional School. Sebuah lembaga pendidikan modern, yang dibanggakan dalam prestasi skala internasional, tetapi memiliki

kebobrokan yang begitu parah.

Betapa anak-anak korban kekerasan seksual ini takut dan malu bercerita bahkan kepada kedua orang tuanya. Butuh treatment khusus untuk menggali keterangan anak korban kekerasan seksual secara komprehensif.

Kedua, kekerasan yang terjadi pada level rumah tangga. Hal ini terlihat pada berita-berita kriminalitas bahwa kekerasan terjadi dengan berbagai sebab. Dalam hal ini kemiskinan, kekerasan pada anak terjadi akibat orang tua yang tidak memiliki etos kerja, atau akibat struktur politik yang tidak memberi ruang kepala rumah tangga mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga, anak menjadi korban kekerasan akibat kemiskinan.

Kekerasan yang lain adalah anak menjadi tulang punggung akibat orang tua yang tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah. Sehingga, kekerasan ini berdampak pada terenggutnya hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan.

Selain itu, kekerasan pada anak muncul atas sebab hubungan terhadap ayah tiri. Kekerasan seksual terjadi pada anak tiri perempuan yang direnggut kehormatannya oleh sang ayah tiri. Dalam banyak kasus terjadi, persoalan ini menimbulkan problem sosial karena anak sampai mengandung dan melahirkan bayi yang tidak diinginkan.

Ketiga, kekerasan pada anak terjadi di ruang publik, yaitu di kota-kota. Kekerasan dalam hal ini menjadikan anak sebagai objek eksploitasi di ruang publik. Misalnya, kita lihat di taman kota, di lampu merah perempatan jalan, di pasar, dan lain-lain.

Kekerasan ini terjadi akibat kota yang absen memenuhi hak-hak anak akan kewajiban pendidikan anak yang lahir dari egoisme kota, dan hidup atas ketakutan-ketakutan para mafia eksploitasi. Kita juga harus mengingat kisah-kisah para psikopat yang mencabuli puluhan anak di bawah umur.

Lampung Urutan Empat

Menurut data Save the Children bahwa di 2015, kekerasan anak di Lampung menempati urutan keempat nasional. Indikator kasus kekerasan anak di Lampung dari temuan dan laporan-laporan didominasi kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, hingga kekerasan mental.

Dari data keseluruhan 2014, menurut Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Damar Provinsi Lampung, tercatat sebanyak 1.025 kasus. Angka kekerasan di kota mencapai 16,20%, sedangkan di kabupaten perdesaan, seperti Lampung Timur hanya 4,39%. Data data tersebut, kekerasan anak lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Lampung dalam kasus kekerasan anak artinya sudah pada angka memprihantinkan.

Berbagai upaya harus dilakukan sebagai bagian memperbaiki masa depan generasi di Provinsi Lampung. Menurut Irwanto (2008), salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah

diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri.

Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Namun, manakala ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak menjadi korban atau dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch, arsitek dari Massachusetts Institute of Technology, tentang persepsi anak terhadap ruang dilaksanakan di empat kota, yakni Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan menggambar. Hasil penelitian menunjukkan lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai: komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; adanya pemberian kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Sangat menarik bahwa anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerja sama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota (Adams & Ingham, 1998:51). Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi, dan pelayanan kesehatan. Anak akan memperoleh pengalaman yang tidak ternilai dari pelibatan mereka.

Melalui kegiatan pelibatan ini, anak menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan kontribusi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan.

Pemerintah Provinsi Lampung dapat mendengar aspirasi anak Lampung melalui lembaga pendidikan, bagaimana mereka dapat nyaman hidup di lingkungan publik. Mereka diajak merumuskan bagaimana Lampung dan pembangunannya menjadikan Lampung dapat menjadi salah satu provinsi yang ramah terhadap anak. Upaya ini juga didukung pemangku kepentingan lainnya, sehingga keinginan orang tua juga perlu disinergikan dengan keinginan anak. Semoga Lampung bisa! n

Arikel ini pernah terbit di Lampungpost Kamis, 28 April 2016 diterbitkan kembali untuk tujuan pendidikan.

<http://lampost.co/berita/lampung-ramah-anak->